

# Tingkat Kemandirian, Efektivitas, Efisiensi Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Aceh Setelah Revisi UU Otonomi Daerah

Almira Keumala Ulfah<sup>1</sup>, Dedy Fernanda<sup>2</sup>, Sisca Mediyanti<sup>3</sup>, Agustina<sup>4</sup>, Josi Farniati<sup>5\*</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Syariah, Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Lhokseumawe, Lhokseumawe, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia

<sup>3</sup>Program Studi Diploma III Akuntansi, Politeknik Kuta Raja, Banda Aceh, Indonesia

<sup>4</sup>Program Studi Diploma IV Analisis Keuangan, Politeknik Kuta Raja, Banda Aceh, Indonesia

<sup>5</sup>Program Studi Diploma III, Politeknik Kutaraja, Banda Aceh, Indonesia

Email: <sup>1</sup>almirakeumalaulfah@iainlhokseumawe.ac.id, <sup>2</sup>dedy.fernanda@yahoo.co.id, <sup>3</sup>sisca.andra@gmail.com, <sup>4</sup>tintun3185@gmail.com, <sup>5</sup>jfarniati@gmail.com

**Abstrak-**Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana tingkat kemandirian, efektivitas, efisiensi keuangan daerah pemerintah provinsi aceh setelah revisi UU otonomi daerah. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Provinsi Aceh (Pemerintah Aceh). Penelitian ini menggunakan data yang secara langsung diperoleh dari Pemerintah Aceh. Analisis data dilakukan menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat kemandirian, efektivitas, efisiensi keuangan daerah pemerintah provinsi aceh setelah revisi uu otonomi daerah. Hasil penelitian dilihat dari tingkat kemandirian Pemerintah Aceh telah berusaha mandiri dalam mengelola keuangan daerahnya dan berusaha untuk dapat berotonomi sesuai dengan sasaran yang hendak dituju dalam otonomi daerah. Hasil penelitian dilihat dari efektifitas karena terlalu tingginya target yang ditetapkan oleh Pemerintah Aceh dari pada kontribusi yang diberikan dari PAD (realisasi yang dicapai) setiap tahunnya. Maka menunjukkan kinerja pemerintah kurang efektif (kurang baik). Hasil penelitian dilihat dari efisiensi Pemerintah Aceh belum mencapai otonomi daerah yang maksimal dimana sasaran otonomi daerah adalah mengupayakan keuangan daerah yang efektif dan efisien. Pemerintah Aceh hanya mampu mengupayakan keuangan daerah yang efisien.

**Kata Kunci:** *Regional Autonomy, Financial Performance, Ratio of Independence, and Effectiveness and Efficiency Ratio of Regional Income*

## 1. PENDAHULUAN

Pemerintah pusat baik di negara maju maupun negara berkembang telah mendelegasikan tanggung jawab, otoritas, dan sumber daya yang terkait (keuangan, personel, peralatan, dan lain-lain) kepada tingkatan pemerintahan yang lebih rendah. Hal tersebut dimaksudkan agar pemerintah daerah dapat mengatur urusan rumah tangga daerahnya sendiri dengan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan agar terdapat juga perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang lebih rasional, proposional, dan nyata.

UU No. 22, Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25, Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah merupakan titik tolak bagi pemerintah untuk meninggalkan sistem pemerintahan yang tersentralisasi menuju sistem pemerintahan baru yang terdesentralisasi. Hal ini memberikan peluang bagi perubahan pembangunan nasional dari pertumbuhan menuju pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang. Perubahan ini dapat diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Kebijakan otonomi daerah melalui UU No. 22 tahun 1999 terdapat sejumlah kelemahan baik dari kebijakan maupun implementasinya. Oleh karena kebijakan otonomi ini memerlukan revisi menjadi UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Seiring direvisinya UU otonomi daerah tentang pemerintah daerah, UU otonomi daerah tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah UU No 25 tahun 1999 juga direvisi menjadi UU No 33 Tahun 2004. Sebagai konsekuensi dari kewenangan otonomi yang luas tersebut, setiap pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata, dan berkesinambungan. Kewajiban itu bisa dipenuhi apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi daerah yaitu potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan potensi sumber daya keuangan secara optimal.

Pemerintah daerah, khususnya Aceh memiliki hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan dengan arah dan tujuan yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan. Sebagai pemerintah yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat pemerintah daerah Aceh mempunyai kewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah mereka berhasil dalam menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Dalam rangka pertanggungjawaban publik tersebut, Pemerintah Daerah harus melakukan optimalisasi anggaran yang dilakukan secara ekonomi, efisiensi, dan efektivitas untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Fenomena yang terjadi selama ini menunjukkan bahwa manajemen dan kinerja keuangan daerah masih sangat memperhatikan. Fakta bahwa hanya beberapa persen saja Penerimaan Daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah menimbulkan ketergantungan keuangan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang sangat tinggi.

Dengan demikian pemberian otonomi daerah dan direvisinya UU tentang otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Setiap daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dari pemerintah pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan Pemerintah Daerah sekarang ini sangatlah tergantung kepada pemerintah dan masyarakat di daerah tersebut dalam mengoptimalkan potensi

daerah yang tersedia. Untuk itu pemerintah daerah harus mampu menjalin hubungan yang harmonis kepada setiap komunitas yang berada di daerahnya sehingga dukungan dan partisipasi masyarakat dijadikan modal dasar dalam pembangunan daerah. Begitu juga dengan dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat, selayaknya ditempatkan sebagai stimulus sehingga dapat menarik dana yang lebih besar lagi yang berasal dari potensi ekonomi daerah yang dimiliki.

Setiap daerah di Indonesia memiliki potensi penerimaan yang berbeda, karena adanya perbedaan potensi sumber daya, tingkat ekonomi dan karakteristik sosial budaya. Oleh karena itu, khusus untuk Provinsi Aceh perlu dilakukan penelitian tersendiri untuk mendapatkan gambaran yang relatif lebih lengkap mengenai kemampuan daerah menjadi daerah otonom. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui sejauh mana Tingkat Kemandirian, Efektivitas, Efisiensi Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Aceh Setelah Revisi UU Otonomi Daerah.

## **2. METODOLOGI PENELITIAN**

Jenis penelitian berbentuk deskriptif, dimana penelitian ini akan menggambarkan fenomena atau karakteristik data yang tengah berlangsung pada saat penelitian ini dilakukan atau selama kurun waktu tertentu untuk menguji dan menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subyek penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh sebagai ibu kota Provinsi Aceh tepatnya di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh (DPKKA) yang beralamat di jalan Tgk. Nyak Arief No.120 Banda Aceh.

Data yang dibutuhkan adalah data sekunder dan data primer. Data primer dan sekunder tersebut dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data yaitu Penelitian Lapangan (Field Research), Study Kepustakaan (Library Research), dan Teknik Dokumentasi.

Metode analisis data yang digunakan adalah metode Kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu mendeskripsikan dan menganalisa data-data dalam laporan APBA dan laporan RAPBA untuk mengetahui sejauh mana kinerja keuangan Pemerintah Aceh dilihat dari kinerja keuangan Pemerintah Aceh dilihat dari tingkat kemandirian, efektivitas, efisiensi keuangan pemerintah

## **3. ANALISA DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Analisis Tingkat Kemandirian Pemerintah Aceh**

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian daerah Pemerintah Aceh dalam berotonomi dapat diketahui melalui seberapa besar kemampuan sumber daya keuangan daerah tersebut dalam mengelola daerahnya, selain itu pula mampu bersaing secara sehat dengan Pemerintah Daerah lainnya dalam mencapai cita-cita otonomi yang sesungguhnya. Upaya nyata dalam mengukur tingkat kemandirian Pemerintah Aceh yaitu dengan membandingkan besarnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total penerimaan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Aceh sebesar Rp. 262.119.998.078,04 dengan total penerimaan daerah pada tahun tersebut sebesar Rp. 3.807.617.892.959,15 . Tingkat Kemandirian pada tahun 2005 ini mencapai 6.88%. Dengan melihat besarnya rasio tersebut dapat diartikan bahwa pendapatan daerah yang berasal dari dalam daerah sendiri tidak sampai sepersepuluh dari total penerimaan daerah secara keseluruhan. Dengan kata lain, penerimaan daerah yang berasal dari luar daerah Pemerintah Aceh jauh lebih besar bila dibandingkan dengan penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pemerintah semakin tinggi dan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah (membayar pajak dan retribusi).

Pada tahun 2006, rasio perbandingan antara pendapatan asli daerah (PAD) dengan total penerimaan naik menjadi sebesar 11,73%. Dengan melihat besarnya rasio tersebut dapat diartikan bahwa kontribusi pendapatan terhadap penerimaan daerah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan semakin berkurangnya ketergantungan daerah terhadap bantuan pemerintah dan semakin meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah dibandingkan pada tahun 2005.

Pada tahun 2007, Tingkat Kemandirian Pemerintah Aceh sebesar 19,50% yang berarti mengalami peningkatan lagi sebesar 7.77%. Kontribusi pendapatan terhadap penerimaan daerah adalah sebesar 19,50% atau sebesar Rp, 587.487.310.959,13. Akan tetapi, tingkat kemandirian pada tahun 2007 ini masih dibawah 25%, yakni sebesar 19,50%. Hal ini menunjukkan masih besarnya kontribusi bantuan dari pemerintah pusat yaitu sebesar 80,50% atau sebesar Rp. 2.424.990.933.226,00.

Pada tahun 2008, tingkat kemandirian Pemerintah Aceh sebesar 10,36% yang berarti bahwa mengalami penurunan sebesar 9,14% dari tahun sebelumnya (tahun anggaran 2007). Kontribusi Pendapatan Asli daerah pada tahun 2008 hanya sebesar 10,36% atau sebesar Rp. 716.290.964.931,10 . Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru mengalami peningkatan, peningkatan tersebut sebesar 21.93% atau sebesar Rp. 128.803.653.971,97 dari tahun sebelumnya. Tetapi peningkatan PAD pada tahun ini belum dapat meningkatkan tingkat kemandirian Pemerintah Aceh. Hal ini disebabkan karena peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian daerah. Kontribusi dari dana perimbangan adalah sebesar 68,42% atau sebesar Rp. 2.605.330.982.982,00 dari total penerimaan. Sehingga naiknya Pendapatan Asli Daerah diikuti pula dengan naiknya penerimaan dari instansi yang lebih tinggi, yang dituangkan dalam dana perimbangan.

Pada tahun 2009, Tingkat Kemandirian Pemerintah Aceh mengalami peningkatan kembali yakni sebesar 1,82% dari tahun sebelumnya (tahun 2008). Pada tahun ini tingkat kemandirian Pemerintah Aceh mencapai 12,18%. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total penerimaan adalah sebesar 12,18% atau sebesar Rp. 735.205.788.491,03. Walaupun tingkat kemandirian mengalami peningkatan, pada tahun 2009 ini tingkat kemandirian masih rendah. Dimana Pemerintah Aceh masih sangat tergantung dengan bantuan dari instansi yang lebih tinggi/pemerintah pusat yaitu sebesar 87,82% atau sebesar Rp. 5,299,242,647,638.00.

### 3.2 Analisis Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Aceh

Efektivitas Pendapatan Asli Daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Untuk menentukan efektif tidaknya pemungutan pendapatan asli daerah digunakan asumsi sebagai berikut:

- Apabila kontribusi keluaran yang dihasilkan (realisasi Pendapatan Asli Daerah) semakin besar terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut (target Pendapatan Asli Daerah) maka dapat dikatakan pemungutan Pendapatan Asli Daerah semakin efektif.
- Apabila kontribusi keluaran yang dihasilkan (realisasi Pendapatan Asli Daerah) semakin kecil terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut (target Pendapatan Asli Daerah) maka dapat dikatakan pemungutan Pendapatan Asli Daerah semakin tidak efektif.

Pada tahun 2005 rasio efektivitas pendapatan asli daerah Pemerintah Aceh sebesar 173,05%, berarti bahwa menunjukkan kinerja yang baik karena rasio efektivitas lebih dari 100%. Efektivitas pemungutan Pendapatan Asli Daerah ini berasal dari komponen-komponen Pendapatan Asli Daerah yang terealisasikan sesuai atau bahkan melebihi target yang telah ditentukan.

Pada tahun 2006, rasio efektivitas pendapatan asli daerah Pemerintah Aceh adalah sebesar 130,08% berarti bahwa menunjukkan kinerja yang baik karena rasio efektivitas lebih dari 100%. Efektivitas pemungutan Pendapatan Asli Daerah ini berasal dari komponen-komponen Pendapatan Asli Daerah yang terealisasikan sesuai atau bahkan melebihi target yang telah ditentukan. Jika dibandingkan tahun sebelumnya efektivitas Pemerintah Aceh mengalami penurunan sebesar 42,97%. Dilihat dari realisasi pendapatan Asli Daerah Pemerintah Aceh pada tahun ini (2006) justru mengalami peningkatan, dimana pada tahun lalu (2005) realisasi Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar Rp. 262.119.988.078,04 meningkat menjadi Rp.476.909.834.495,57. Peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2006 dikarenakan adanya peningkatan target komponen Pendapatan Asli daerah. Sedangkan penurunan efektivitas pendapatan daerah Pemerintah Aceh tahun 2006 dikarenakan pada tahun sebelumnya (2005) kontribusi realisasi yang diberikan lebih besar dari target yang ditetapkan dibandingkan dengan tahun ini (2006).

Pada tahun 2007, rasio efektivitas pendapatan asli daerah Pemerintah Aceh adalah sebesar 104,33% yang berarti masih menunjukkan kinerja yang baik karena rasio efektivitas lebih dari 100%. Efektivitas pemungutan Pendapatan Asli Daerah ini berasal dari komponen-komponen Pendapatan Asli Daerah yang terealisasikan sesuai atau bahkan melebihi target yang telah ditentukan. Jika dibandingkan tahun sebelumnya efektivitas Pemerintah Aceh mengalami penurunan sebesar 25,75%. Dilihat dari realisasi pendapatan Asli Daerah Pemerintah Aceh pada tahun ini (2007) justru mengalami peningkatan, dimana pada tahun lalu (2006) realisasi Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar Rp. 476.909.834.495,57 meningkat menjadi Rp. 587.487.310.959,13. Penurunan efektivitas pendapatan daerah Pemerintah Aceh tahun 2007 dikarenakan pada tahun sebelumnya (2006) kontribusi realisasi yang diberikan lebih besar dari target yang ditetapkan dibandingkan dengan tahun ini (2007).

Pada tahun 2008, rasio efektivitas pendapatan asli daerah Pemerintah Aceh adalah sebesar 90,02% berarti bahwa menunjukkan kinerja yang kurang baik karena rasio efektivitas kurang dari 100%. Efektivitas pemungutan Pendapatan Asli Daerah ini berasal dari komponen-komponen Pendapatan Asli Daerah yang terealisasikan. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya efektivitas Pemerintah Aceh mengalami penurunan sebesar 14,31%. Dilihat dari realisasi pendapatan Asli Daerah Pemerintah Aceh pada tahun ini (2008) justru mengalami peningkatan, dimana pada tahun lalu (2007) realisasi Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar Rp. 587.487.310.959,13 meningkat menjadi Rp.716.290.964.931,10. Peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2008 dikarenakan adanya peningkatan target komponen Pendapatan Asli daerah. Sedangkan penurunan efektivitas pendapatan daerah Pemerintah Aceh tahun 2008 dikarenakan pada tahun sebelumnya (2007) kontribusi realisasi yang diberikan lebih besar dari target yang ditetapkan dibandingkan dengan tahun ini (2008) dan adanya beberapa target dari komponen-komponen Pendapatan Asli Daerah yang tidak dapat terealisasi sesuai target.

Pada tahun 2009, rasio efektivitas pendapatan asli daerah Pemerintah Aceh adalah sebesar 92,38% berarti bahwa menunjukkan kinerja yang kurang baik karena rasio efektivitas semakin kurang dari 100%. Efektivitas pemungutan Pendapatan Asli Daerah ini berasal dari komponen-komponen Pendapatan Asli Daerah yang terealisasikan. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya efektivitas Pemerintah Aceh mengalami peningkatan sebesar 2,36%. Dilihat dari realisasi pendapatan Asli Daerah Pemerintah Aceh pada tahun ini (2008) juga mengalami peningkatan, dimana pada tahun lalu (2008) realisasi Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar Rp.716.290.964.931,10 meningkat menjadi Rp. 735.205.788.491,03. Peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2009 dikarenakan adanya peningkatan target komponen Pendapatan Asli daerah yang dapat terealisasi sesuai target.

### 3.3 Analisis Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Aceh

Efisiensi Pendapatan Asli Daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1(satu) atau dibawah 100%. Semakin

kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya. Hal itu perlu dilakukan karena meskipun daerah berhasil merealisasikan penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan lebih besar.

Pada tahun 2005 rasio efisiensi sebesar 3,40%, pada tahun ini (2005) biaya pemungutan yang dikeluarkan pemerintah daerah adalah sebesar Rp.8.922.083.859,43,- sedangkan realisasi yang diterima adalah sebesar Rp.262.119.988.078,04,-, berarti bahwa menunjukkan kinerja yang baik karena rasio efisiensi dibawah 100%. Efisiensi pemungutan Pendapatan Asli Daerah ini berasal dari komponen-komponen Pendapatan Asli Daerah yang terealisasi cukup besar dengan biaya pemungutan yang rendah.

Pada tahun 2006 rasio efisiensi sebesar 3,32%, biaya pemungutan yang dikeluarkan pemerintah adalah sebesar Rp.15.827.791.690,55, sedangkan realisasi yang diterima sebesar Rp. 476.909.834.495,57,-. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada tahun ini (2006) efisiensi pendapatan asli daerah Pemerintah Aceh mengalami penurunan yang artinya menunjukkan pengeluaran dan kinerja pemerintah yang semakin efisien.

Pada tahun 2007 rasio efisiensi sebesar 3,16%, biaya pungut yang dikeluarkan adalah sebesar Rp.18.557.859.717,70, sedangkan realisasi yang diterima adalah sebesar Rp.587.487.310.959,13, menunjukkan pengeluaran dan kinerja pemerintah yang efisien. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada tahun ini (2007) efisiensi pendapatan asli daerah Pemerintah Aceh mengalami penurunan. Hal ini disebabkan persentase peningkatan penerimaan pemerintah yang bersumber dari pendapatan asli daerah lebih besar bila dibandingkan dengan persentase peningkatan biaya-biaya untuk memungut pendapatan asli daerah tersebut.

Pada tahun 2008 rasio efisiensi sebesar 3,32%, biaya pungut yang dikeluarkan adalah sebesar Rp.23.815.972.230,80, sedangkan realisasi yang diterima adalah sebesar Rp.716.290.964.931,10, menunjukkan pengeluaran yang efisien. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2007) efisiensi pendapatan asli daerah Pemerintah Aceh mengalami peningkatan sebesar 0,17%. Hal ini dapat diartikan rasio efisiensi naik mendekati 100% yang artinya kinerja/kemampuan pemerintah dalam memungut PAD mendekati ketidakefisienan kinerja. Dilihat dari realisasi pendapatan Asli Daerah Pemerintah Aceh pada tahun ini (2008) justru mengalami peningkatan, dimana pada tahun lalu (2007) realisasi Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar Rp.587.487.310.959,13 meningkat menjadi Rp. 716.290.964.931,10. Begitu juga dengan biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD, dimana biaya pungut pada tahun sebelumnya (2007) sebesar Rp.18.557.859.717,70 meningkat menjadi Rp. 23.815.972.230,80. Peningkatan rasio efektifitas pada tahun ini (2008) disebabkan karena kontribusi antara biaya pungut dan realisasi pendapatan asli daerah jauh lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2007).

Pada tahun 2009 rasio efisiensi sebesar 3,22% menunjukkan pengeluaran yang efisien. Biaya pungut yang dikeluarkan adalah sebesar Rp. 23,709,606,789.10 sedangkan realisasi yang diterima adalah sebesar Rp. 735,205,788,491.03 menunjukkan pengeluaran dan kinerja pemerintah yang efisien. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya pada tahun ini (2009) efisiensi pendapatan asli daerah Pemerintah Aceh mengalami penurunan. Jika dilihat dari realisasi pendapatan Asli Daerah Pemerintah Aceh pada tahun ini (2009) justru mengalami peningkatan, dimana realisasi pendapatan asli daerah pada tahun ini (2009) sebesar Rp. 735,205,788,491.03. Dilihat dari segi efisiensi, pada tahun 2009 dengan besar realisasi PAD dan biaya pungut tersebut, menunjukkan kinerja Pemerintah Aceh yang efisien karena rasio yang dicapai masih kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen.

### **3.4 Evaluasi dan Analisis terhadap analisis Tingkat Kemandirian Pemerintah Aceh**

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian daerah Pemerintah Aceh dalam berotonomi dapat diketahui melalui seberapa besar kemampuan sumber daya keuangan daerah tersebut dalam mengelola daerahnya, selain itu pula mampu bersaing secara sehat dengan Pemerintah Daerah lainnya dalam mencapai cita-cita otonomi yang sesungguhnya.

Dari penelitian yang penulis lakukan dapat dilihat bahwa, kinerja/kemampuan keuangan Pemerintah Aceh yang diukur dengan rasio tingkat kemandirian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Aceh setelah diterapkannya revisi UU tentang otonomi daerah, UU 32 dan 34 tahun 2004 (tahun 2005-2009) masih rendah.

Dapat disimpulkan bahwa kemandirian daerah Pemerintah Aceh dalam mencukupi kebutuhan pembiayaan untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat masih rendah. Tingkat kemandirian Pemerintah Aceh hanya berkisar antara 6,88% sampai 19,50% dengan rata-rata 12,13%. Dari tahun anggaran 2005-2009 pola hubungan situasional dalam pelaksanaan otonomi daerah di Pemerintah Aceh menunjukkan pola hubungan yang instruktif (kemampuan keuangan yang rendah, dengan range 0% - 25%), dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian Pemerintah Aceh.

Pemerintah Aceh dari tahun ke tahun ke tahun selama lima tahun anggaran 2005-2009 telah berusaha meningkatkan kinerja keuangannya. Yang berarti Pemerintah Aceh terus berusaha untuk mandiri dalam pelaksanaan otonomi daerah dan membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Naik turunnya kinerja keuangan Pemerintah Aceh dan memiliki pola instruktif disebabkan betapa dominannya transfer dari pemerintah pusat dalam APBA secara keseluruhan pada Pemerintah Aceh. Dominannya peran Pemerintah Pusat dapat dilihat dari besarnya penerimaan yang berasal dari pemerintah atau instansi yang lebih tinggi, dana perimbangan serta lain-lain penerimaan yang sah. Kontribusi terbesar bagian pendapatan selama lima tahun anggaran (tahun anggaran 2005-2009) pada keuangan Pemerintah Aceh, berasal dari penerimaan pemerintah pusat atau instansi yang lebih tinggi. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya memberi kontribusi yang relatif kecil. Hal ini menunjukkan

bahwa sangat rendahnya kemandirian Pemerintah Aceh dalam mencukupi kebutuhan pembiayaan untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat.

Rasio kemandirian ini juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Hal ini berarti masih kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah. Berdasarkan hal tersebut perlu adanya usaha untuk mengurangi ketergantungan atas sumber dana ekstern, yakni dengan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas finansial baik melalui pengoptimalan sumber pendapatan yang telah ada maupun dengan mengembangkan basis pajak, meningkatkan pengumpulan pajak dan retribusi, merasionalkan pengeluaran, mempromosikan kemitraan swasta-pemerintah dalam menyediakan pelayanan dan menggunakan lahan sebagai sumber daya yang penting.

### **3.5 Evaluasi dan Analisa Terhadap Analisis Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Aceh**

Efektivitas Pendapatan Asli Daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Dari penelitian yang penulis lakukan dan sesuai dengan teori yang dijelaskan pada tinjauan kepustakaan dapat dilihat bahwa, kinerja/kemampuan keuangan Pemerintah Aceh yang diukur dengan rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Aceh setelah diterapkannya revisi UU tentang otonomi daerah, UU 32 dan 34 tahun 2004 (tahun 2005-2009) masih belum efektif

Efektivitas pemungutan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Aceh tahun anggaran 2005-2009 mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Aceh bekisar dari 173,05% Menurun sampai dengan 90,02%. Pemerintah Aceh hanya mampu melakukan efektivitas pendapatannya pada tahun 2005-2007.

Selama lima tahun anggaran (2005-2009) pemungutan Pendapatan Asli Daerah kurang efektif, karena kontribusi yang diberikan terhadap target yang ditetapkan dari tahun ke tahun semakin menurun. Hal ini juga disebabkan karena terlalu tingginya target yang ditetapkan oleh Pemerintah Aceh dari pada kontribusi yang diberikan dari PAD (realisasi yang dicapai) setiap tahunnya.

Dari tahun 2005-2009 rasio efektivitas ini terus mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena pemerintah Aceh kurang begitu terampil dalam mengontrol rencana dan realisasi terhadap pajak daerah dan retribusi daerah pada APBA dan Pemerintah Aceh perlu terus berusaha memperbaiki dan melaksanakan tugas dan program-program salah satunya untuk meningkatkan realisasi pendapatan asli daerah di masa yang akan datang.

### **3.6 Evaluasi dan Analisa Terhadap analisis Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Aceh**

Efisiensi Pendapatan Asli Daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1(satu) atau dibawah 100%.

Dari penelitian yang penulis lakukan dan sesuai dengan teori yang dijelaskan pada tinjauan kepustakaan dapat dilihat bahwa, kinerja/kemampuan keuangan Pemerintah Aceh yang diukur dengan rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Aceh setelah diterapkannya revisi UU tentang otonomi daerah, UU 32 dan 34 tahun 2004 (tahun 2005-2009) sudah efisien.

Efisiensi pemungutan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Aceh tahun anggaran 2005-2009 mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Rasio efisiensi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Aceh bekisar dari 3,40% sampai dengan 3,16% yang menunjukkan kinerja pemerintah yang efisien. Efisiensi pemungutan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Aceh tahun anggaran 2005-2009 mengalami penurunan. Rasio efisiensi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Aceh bekisar dari 3,40% sampai dengan 3,16%. Hal itu menunjukkan kinerja pemerintah dalam memungut Pendapatan Asli Daerah telah efisien. Terlihat jelas bahwa rasio efisiensi Pemerintah Aceh setiap tahunnya semakin jauh dari 100. Hal ini berarti realisasi Pendapatan Asli Daerah yang di terima Pemerintah Aceh lebih besar dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk memungut Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selama lima tahun anggaran (2005-2009) biaya pemungutan Pendapatan Asli daerah yang harus dikeluarkan memang mengalami peningkatan setiap tahunnya, tetapi peningkatan tersebut tidak mempengaruhi tingkat efisiensi karena realisasi Pendapatan Asli Daerah juga meningkat setiap tahunnya. Kecuali pada tahun 2009, biaya pungut mengalami penurunan, penurunan biaya pungut tidak mempengaruhi realisasi pendapatan asli daerah karena Realisasi Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya (2008). Yang berarti kinerja pemerintah semakin efisien. Dimana biaya pungut menurun tetapi realisasi Pendapatan Asli Daerah meningkat.

Dilihat dari Perkembangan rasio efektivitas dan efisiensi pendapatan asli daerah Pemerintah Aceh, rasio efektivitas menunjukkan kinerja pemerintah masih belum efektif, sedangkan dari Rasio efisiensi menunjukkan kinerja pemerintah yang efisien dalam melakukan pemungutan Pendapatan Asli Daerahnya. Hal ini berarti bahwa Pemerintah Aceh belum mencapai otonomi daerah yang maksimal dimana sasaran otonomi daerah adalah mengupayakan keuangan daerah yang efektif dan efisien. Pemerintah Aceh hanya mampu mengupayakan keuangan daerah yang efisien.

## **4. KESIMPULAN**

Tingkat kemandirian daerah Pemerintah Aceh yang diukur melalui Pendapatan Asli Daerah hanya mencapai rata-rata 12,13% dan selama 5 tahun anggaran (tahun anggaran 2005 sampai dengan tahun 2009) mengalami naik turun (tidak stabil). Rata-rata Pendapatan Asli Daerah terhadap total penerimaan daerah masih di bawah 25% yaitu hanya sebesar 12,13% per-tahun sehingga pola hubungan tingkat kemandirian daerah adalah instruktif yang berarti kemandirian Pemerintah Aceh sangat rendah dan belum mampu untuk melaksanakan otonomi keuangan daerah. Tetapi jika dilihat

perkembangan kemandirian Pemerintah Aceh untuk setiap tahun anggarannya mengalami peningkatan, dikarenakan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Aceh setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup besar. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Aceh telah berusaha mandiri dalam mengelola keuangan daerahnya dan berusaha untuk dapat berotonomi sesuai dengan sasaran yang hendak dituju dalam otonomi daerah.

Efektivitas pendapatan daerah Pemerintah Aceh selama lima tahun anggaran (tahun anggaran 2005 sampai dengan tahun 2009) rata-rata sebesar 117,97%. Dengan demikian pemungutan Pendapatan Asli Daerah cenderung efektif, karena kontribusi yang diberikan terhadap target yang ingin dicapai lebih dari 100%. Hal ini menunjukkan kinerja pemerintah daerah yang baik, Jika Dilihat dari segi perkembangan rasio efektifitas mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal itu menunjukkan bahwa selama lima tahun anggaran (2005-2009) pemungutan Pendapatan Asli Daerah tidak efektif, karena kontribusi yang diberikan terhadap target yang ditetapkan dari tahun ke tahun semakin menurun. Hal ini juga disebabkan karena terlalu tingginya target yang ditetapkan oleh Pemerintah Aceh dari pada kontribusi yang diberikan dari PAD (realisasi yang dicapai) setiap tahunnya. Sehingga menunjukkan kinerja pemerintah yang kurang efektif (kurang baik).

Efisiensi pemungutan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Aceh selama lima tahun anggaran yaitu dari tahun anggaran 2005 sampai dengan tahun anggaran 2009 rata-rata sebesar 3,29% dan setiap tahun anggaran mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa pemungutan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Aceh dari tahun ke tahun semakin efisien karena biaya yang dikeluarkan untuk memungut Pendapatan Asli Daerah semakin proposional dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah yang didapatkan. Dengan demikian kinerja Pemerintah Daerah Pemerintah Aceh dalam mengelola keuangan darahnya semakin baik. Walaupun setiap tahunnya biaya pemungutan mengalami peningkatan, tetapi peningkatan tersebut tidak mempengaruhi tingkat efisiensi karena realisasi Pendapatan Asli Daerah yang diterima setiap tahunnya juga mengalami peningkatan. Rasio efektivitas menunjukkan kinerja pemerintah masih belum efektif, sedangkan dari Rasio efisiensi menunjukkan kinerja pemerintah yang efisien dalam melakukan pemungutan Pendapatan Asli Daerahnya. Hal ini berarti bahwa Pemerintah Aceh belum mencapai otonomi daerah yang maksimal dimana sasaran otonomi daerah adalah mengupayakan keuangan daerah yang efektif dan efisien. Pemerintah Aceh hanya mampu mengupayakan keuangan daerah yang efisien.

## REFERENCES

- [1] Ulfah AK, Fernanda D, Mediyanti S, Andina A. Analisis Kemampuan Pembiayaan Keuangan Pemerintah Provinsi Aceh Setelah Penerapan Revisi UU Tentang Otonomi Daerah. 2019:113-116.
- [2] Mediyanti S. Analisis Dampak Penggunaan Dana Otonomi Khusus Aceh ( DOKA ) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Aceh. 2019;7(1):56-60.
- [3] Indonesia R. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.*; 2004.
- [4] Indonesia R. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.*; 2004.
- [5] Indonesia R. *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.*; 1997.
- [6] Indonesia R. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.*; 2006.
- [7] Kuncoro, Mudrajad (2004) "Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang". Jakarta: Erlangga.